

Nama : Selly Ismi Safitri

NPM : 2213031049

Ekonomi Industri

1. a. Posisi Indonesia dalam GVC selama ini didominasi sebagai pemasok bahan mentah. Kelebihannya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga mampu menarik investasi berbasis ekstraksi dan menjadi bagian awal rantai pasok global. Peran ini relatif mudah dimasuki dan memberikan penerimaan ekspor dalam jangka pendek.  
Namun, kekurangannya sangat signifikan. Sebagai pemasok bahan mentah, Indonesia hanya memperoleh nilai tambah rendah, rentan terhadap fluktuasi harga global, dan memiliki daya tawar lemah terhadap perusahaan multinasional. Posisi ini juga menciptakan ketergantungan struktural pada negara pengolah dan membatasi peningkatan pendapatan, teknologi, serta kualitas tenaga kerja domestik.  
  
b. Dalam perspektif Global Value Chains, Indonesia masih terjebak pada *low value-added activities*. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas industri pengolahan, rendahnya penguasaan teknologi, lemahnya riset dan inovasi, serta kurangnya integrasi industri hulu–hilir. Selain itu, kebijakan industri yang tidak konsisten dan infrastruktur pendukung yang belum merata menghambat proses *upgrading* dalam GVC.
2. a. Secara ekonomi, kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel berpotensi meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC dengan memaksa proses pengolahan dilakukan di dalam negeri. Kebijakan ini dapat mendorong investasi smelter, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan nilai tambah domestik. Dalam konteks geopolitik, kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok strategis dalam transisi energi global, khususnya industri baterai kendaraan listrik. Namun, kebijakan ini juga memiliki risiko. Jika tidak diiringi penguatan kapasitas industri dan SDM, Indonesia hanya berpindah dari eksportir bahan mentah ke eksportir produk setengah jadi dengan ketergantungan teknologi asing. Selain itu, pendekatan koersif berpotensi memicu sengketa dagang internasional.

b. Kebijakan hilirisasi memicu ketegangan dengan mitra dagang, seperti Uni Eropa, yang melihat larangan ekspor sebagai hambatan perdagangan. Gugatan ke WTO menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang tidak selaras dengan aturan perdagangan global dapat merusak kepercayaan dan stabilitas hubungan dagang, meskipun tujuan domestiknya sah.

3. Sebagai penasihat ekonomi pemerintah, strategi yang diusulkan adalah pendekatan upgrading GVC yang selektif dan kooperatif. Pertama, Indonesia perlu melanjutkan hilirisasi, tetapi dengan pendekatan bertahap dan berbasis insentif, bukan semata larangan. Insentif fiskal dan nonfiskal harus dikaitkan dengan transfer teknologi, pengembangan R&D lokal, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Kedua, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi agar kebijakan industrialisasi dipahami sebagai bagian dari pembangunan nasional yang sah. Kerja sama strategis dengan mitra dagang, *joint ventures*, dan perjanjian industri hijau dapat menjadi jalan tengah untuk menjaga hubungan internasional.

Ketiga, fokus kebijakan harus diarahkan pada *functional upgrading*, yaitu peningkatan peran Indonesia ke aktivitas bernilai tambah tinggi seperti desain, rekayasa, dan pengembangan produk. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya naik kelas dalam GVC, tetapi juga membangun industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan tetap terintegrasi secara harmonis dalam sistem perdagangan global.